ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Batceba Ronike Kaitana

Universitas Nusa Putra
E-mail : batcebaronikekaitana@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam sistem keuangan pemerintah daerah yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pengelolaan pendapatan daerah meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD. Tahap pelaporan dilakukan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, dalam praktiknya pengelolaan pendapatan daerah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penerimaan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, APBD, Akuntabilitas Publik, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Regional revenue management represents a crucial element of the regional government financial system in supporting the implementation of governance and regional development. This study aims to analyze the role of local government in managing and accounting for regional revenue budgets in Southwest Papua Province. Regional revenue constitutes a fundamental component of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), reflecting the capacity of local governments to optimize potential revenue sources in order to support regional development and improve community welfare. In the context of regional governance as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, regional financial management must be conducted based on principles of administrative order, compliance with regulations, efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. These principles are further strengthened by Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. The management of regional revenue involves several stages, including planning, implementation, reporting, and supervision. During the planning stage, local governments determine revenue targets based on regional economic potential, which are outlined in planning documents such as the Regional Government Work Plan (RKPD) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The reporting stage is conducted through the preparation of the Regional Government Financial Statements (LKPD), which are subsequently audited by the Supreme Audit Agency (BPK) as part of external oversight of regional financial management. However, in practice, several challenges remain, including limited human resources, weak internal supervision systems, and the underutilization of locally generated revenue potential. Therefore, strengthening internal control systems, improving the capacity of regional government officials, and utilizing digital technology in regional revenue systems are essential to enhance transparency and accountability in regional financial management.

Keywords : ***Regional Financial Management, Regional Revenue, APBD, Public Accountability, Good Governance.***

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangan guna meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan daerah. Dalam APBD, komponen pendapatan daerah memegang peranan penting karena menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan keuangan daerah meliputi serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan secara mandiri.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Instansi ini memiliki tugas dalam menyusun perencanaan anggaran, mengelola pendapatan daerah, melakukan penatausahaan keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit pelaksana teknis seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang berperan dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kedua jenis pajak tersebut merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan APBD.

Meskipun sistem pengelolaan keuangan daerah telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya sistem pengawasan internal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah masih memerlukan perbaikan dan penguatan sistem agar dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, analisis terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Barat Daya serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan internship di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan proses pengelolaan pendapatan daerah serta mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan daerah berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota. Target tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.

Pada tahap pelaksanaan, instansi terkait seperti BPKAD dan Samsat berperan dalam mengelola penerimaan pajak daerah. Penerimaan tersebut kemudian dicatat dan dikelola melalui sistem administrasi keuangan daerah. Selanjutnya, tahap pelaporan dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas. Pada tahap pelaporan, pemerintah daerah juga menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja daerah, serta posisi keuangan pemerintah daerah pada periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Tahap selanjutnya adalah pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan pendapatan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah seperti inspektorat daerah, serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui proses audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat Daya secara umum telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah telah melakukan proses perencanaan hingga

pelaporan secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masih terdapat beberapa sistem administrasi yang perlu ditingkatkan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain faktor sumber daya manusia, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Beberapa potensi pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga kontribusi PAD terhadap APBD masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, seperti memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat Daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga masih belum optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Keterbatasan sumber daya manusia, tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum optimalnya sistem pengendalian internal pada beberapa perangkat daerah. Sistem pengendalian internal yang kurang kuat dapat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pencatatan, pengelolaan, maupun pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal agar setiap proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penguatan sistem pengendalian internal juga penting untuk meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, setiap kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dapat dipantau secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih efektif.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi keuangan

daerah. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan serta mempermudah proses pengawasan terhadap penerimaan daerah.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dapat meningkatkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara lebih transparan dan akuntabel.

Pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat Daya telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai perbaikan dalam aspek sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Daerah di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian penting dalam sistem keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Proses pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah juga perlu didukung oleh sistem pengawasan yang efektif serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang baik akan membantu memastikan bahwa setiap penerimaan dan penggunaan anggaran daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, perbaikan sistem administrasi pendapatan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal dalam membiayai pembangunan daerah. Penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan akuntabel, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 8(2), 115–128.

Herlinanur, N., Salsabillah, N., Tobing, N., & Pangestoeti, W. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 45–57.

Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. (2025). The role of transparency and accountability in regional financial management: A systematic literature review. *Journal of Governance and Public Administration*, 5(1), 21–34.

Oktari, A., Solikhin, A., & Dahmiri. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 12(1), 87–98.

Palowa, A., Lantowa, F., & Yusuf, F. (2025). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 6(1), 63–75.

Sipahutar, B. P., Rahwani, D. A., & Zebua, D. F. (2024). The impact of regional financial management, accountability, and transparency on local government financial performance. *Economic: Journal of Economic and Business*, 8(2), 142–153.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.